

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG
(E-WARONG) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh :

AWAL MAULANA

105640203014



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG
(E-WARONG) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan**

Disusun dan Ditujukan oleh

AWAL MAULANA

105640203014

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Awal Maulana

Nomor Induk : 105640203014


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 20 Januari 2022.

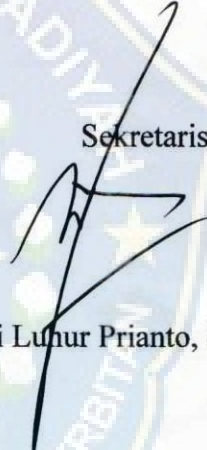


TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Penguji


1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (ketua)


(.....)

2. Muh Randhy Akbar, S.IP., M.Si


(.....)

3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Awal Maulana

Nomor Stambuk : 105640203014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Awal Maulana

ABSTRAK

Awal Maulana, 2021. Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh Rudi Hardi dan Ahmad Taufik)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan pokok sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa efektifitas program E-Warong yang mencakup proses dan hasil. Efisiensi untuk mendapatkan bantuan sosial cukup mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada kartu kombonya atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KPM menerima manfaat berupa beras 10 Kg, telur 1 rak dan buah-buahan yang diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dapat memenuhi gizi seimbang. Hanya saja faktor yang mempengaruhi diberlakukannya program E-Warong ini adalah data yang jarang diperbaharui.

Kata Kunci : E-Warong, Evaluasi, Kesejahteraan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT.

Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamaikan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang Maha Pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan Percikan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia utusan Allah SWT, Muhammad SAW, sang pembawa cahaya dari yang gelap gulita menjadi alam yang terang. Beliaulah pejuang dan panutan sejati dunia akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga ditulis untuk menjadi bahan referensi pembaca ataupun penulis selanjutnya. Skripsi ini berjudul “**Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa**”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala usaha, bimbingan, dorongan motivasi, semangat dan kasih sayang dari orang-orang yang mendukung penulis dalam

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H. Akbar Nawang dan Ibunda HJ. Satriah Rimang atas segala limpahan kasih sayang, semangat dan dorongan serta didikannya juga senantiasa tak henti-hentinya mendoakan sehingga menjadikan motivasi untuk penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP, M.AP selaku pembimbing II, yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang begitu tulus dalam membantu penulis. Dan tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis serta memberikan informasi
5. Kepada para narasumber/informan yang telah bersedia meluangkan waktu

dan memberikan informasi selama melakukan penelitian.

6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat Ridha dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat kepada setiap pembaca. Amin.



Makassar, 2 Januari 2022

Penulis

Awal Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENERIMA TIM.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan/Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Evaluasi Program.....	12
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	25
D. Konsep Program E-Warong.....	31
E. Kerangka Fikir.....	43
F. Fokus Penelitian	44
G. Deskriptif Fokus Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	45
C. Sumber Data	45
D. Informan Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Pengabsahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	51
B. Deskripsi Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Parigi	58
C. Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	46
Tabel 2	57
Gambar 1	76
Gambar 2	76
Gambar 3	77
Gambar 4	77
Gambar 5	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan memang masih menjadi permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di setiap daerah. Hal ini dikarenakan akar permasalahan sosial penyebab dari kemiskinan sangatlah kompleks, seperti pendidikan masyarakat yang rendah, jumlah penduduk yang besar, kesenjangan ekonomi masyarakat, fundamen ekonomi dan moneter yang sangat lemah, maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang merugikan rakyat, dan lain sebagainya.

Dari fakta ini dapat diambil benang merahnya bahwa kemiskinan adalah masalah yang sangat serius karena melibatkan berbagai unsur di dalamnya. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dikatakan kompleks, maka butuh strategi-strategi untuk mengentaskannya. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial kemudian ditindak lanjuti dengan Perpres N0. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mencanangkan program pemberdayaan fakir miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka Mempercepat Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ini juga disinergikasikan dengan beberapa program lainnya, seperti

Program Keluarga Harapan (PKH) yang salah satu bentuk pelayanannya adalah pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH).

Program E-Warung ini akan menjadi sarana masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras masyarakat miskin (raskin) pada tahun 2016 dengan kualitas yang lebih baik dan harga terjangkau.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial meluncurkan program E-Warung KUBE PKH yang akan menjadi program pembayaran keuangan sekaligus perpanjangan tangan dari perbankan serta penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bagi penerima manfaat program bantuan pangan, sehingga penerima manfaat tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 14 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau Pemerintahan Daerah.

Tujuan inovasi pemerintah daerah adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu upaya pencapaian kesejahteraan

tersebut adalah melalui pelayanan publik. Sayangnya kualitas pelayanan publik hingga tahun 2016 masih belum optimal.

Pelayanan publik adalah hak rakyat yang harus dipenuhi. Prinsip pelayanan cepat, transparan, murah dan akuntabel adalah pelayanan yang menjadi impian masyarakat. Sayangnya kebutuhan akan layanan yang ideal belum banyak terwujud. Kualitas pelayanan publik di Indonesia dinyatakan belum optimal menurut penilaian Ombudsmen Republik Indonesia (ORI).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bermaksud memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan perwujudan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini meminta pada pemerintahan yang lebih kecil dari negara manapun. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya

melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis.

Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya. Karakteristik sistem pemerintahan daerah yang mengidealkan pola hubungan yang bersifat horizontal alias tidak hirarkis tersebut di atas menghadapi kritik yang sangat luas dari elit pemerintahan ataupun masyarakat biasa. Karena hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi bersifat hirarkis maka fungsi koordinasi menjadi sulit dilakukan.

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dianggap sangat penting karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan yang terus meningkat. Perkembangan keadaan yang objektif memang seharusnya diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Kabupaten Gowa menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 38.558 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Mereka terdiri dari 23.814 Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 14.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 110.000 setiap bulannya. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui E-Warong atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BNI.

Saat ini telah tersedia 114 agen yang telah disebar di Gowa. Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warong. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Gowa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Amir, 2018).

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank

Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pada tahun 2020 nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000.- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000.- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020). Dengan adanya Pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan 98.786 Bansos bagi keluarga kurang mampu termasuk mereka yang terdampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat, terutama pada keluarga rentan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan masuk ketahap pelaksanaan pada Senin 04 Mei 2020. Berdasarkan data Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Kabupaten Gowa, bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai program sosial pemerintah pusat hingga kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis “ **Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan di atas, peneliti dapat menuliskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada di atas, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Model Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa ?

D. Kegunaan/Manfaat

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam Tata Kelola dan Evaluasi suatu Program
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa..

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman atau bahan evaluasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah dan evaluasi dan monitoring suatu program.
- b. Sebagai rujukan atau pedoman rekan mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian terkait E-Warong antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mery Anggraini pada tahun 2020 mahasiswa Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Penelitian dengan judul Efektivitas Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Sukodadi Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (EWarong KUBE PKH) dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Sukodadi Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% yaitu berjumlah 78 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT dengan pengambilan sampel menggunakan sampling insidental, sedangkan 2 orang dijadikan sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, angket dan wawancara. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Sukodadi Palembang dinyatakan efektif. Hal ini terbukti dari analisis data dan pembahasan dari hasil angket, kelima indikator yang menjadi tolak ukur penelitian dengan 23 pernyataan didapatkan jumlah skor rata-rata keseluruhan adalah 86,7% dengan interval persentase ($\geq 62,5\%$).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah pada fokus penelitian evaluasi program E-Warong.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azlan Suhaini Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2019.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program pemberdayaan masyarakat miskin dari pemerintah pusat yang ada di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, yang mana program pemberdayaan tersebut khusus untuk membantu masyarakat dari segi perekonomian dan juga kebutuhan pangan masyarakat miskin sehari-hari. Program tersebut ialah Program Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan Pangan

Non Tunai yang mempunyai indikator 5T yakni : Tepat Administrasi, Tepat Sasaran, Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas dan Tepat Waktu.

Di Kelurahan Tuah Karya masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong kedalam kategori masyarakat miskin yang harus diberdayakan perekonomian dan kebutuhan pangannya sehari-hari dengan program bantuan pangan non tunai ini. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan suatu masyarakat yang sedang dalam keadaan kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan atau tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah.

Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini merumuskan hasil pembahasan dengan menggunakan deskriptif kata-kata dengan perolehan datanya melalui cara observasi langsung ke lapangan, dengan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat penerima manfaat, lalu melakukan dokumentasi, serta wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri dari 5 orang informan pendukung dan 1 orang informan kunci.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi program bantuan pangan non tunai ini. Dan berdasarkan hasil pembahasan dan analisa peneliti pada penelitian implementasi program bantuan pangan non tunai ini

terimplementasikan struktur. Program dilaksanakan secara struktur, terbantunya ekonomi dan kecukupan pangan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jakra Hadepa Riyadi. Skripsi ini berjudul Penanggulangan Kemiskinan Berbasis E-Warong Program Keluarga Harapan (Studi E-Warong KUBE Mugi Barokah Desa Klopogodo Kec. Gombang Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah). Judul skripsi tersebut dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang masih menjadi masalah serius dalam pembangunan di Indonesia, begitu juga halnya dengan Kab. Kebumen yang konsisten dengan peringkat kedua termiskin dalam lima tahun terakhir ini di Prov. Jawa Tengah.

Salah satu program untuk mengatasi kemiskinan tersebut adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang di dalamnya terdapat program pemberdayaan KPM melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warong KUBE PKH). Salah satu EWarong KUBE PKH di Kab. Kebumen dengan pengelolaan yang sudah baik adalah E-Warong Mugi Barokah desa Klopogodo Kec. Gombang. Sejak berdiri dari Januari Tahun 2017, E-Warong ini menjadi solusi bagi pengurus dan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang didapatkan dari hasil keuntungan E-Warong.

Pada konsep pemberdayaan ini, peran dari seorang Pendamping Sosial PKH Kec. Gombang sangat sentral keberadaannya untuk mencapai tujuan E-Warong itu sendiri, yaitu meningkatnya

kesejahteraan keluarga dari pengurus dan anggota E-Warong tersebut. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara aktif, observasi lapangan, dan dokumentasi. Adapun sumber informan yang diambil sebanyak 7 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanggulangan kemiskinan berbasis E-Warong KUBE PKH Mugi Barokah dilaksanakan dengan sebuah management organisasi kewirausahaan dimulai dari, yaitu: Pertama, tahap planning tahap awal dalam penentuan peserta, penentuan tempat, pengadministrasian, dan penyamaan tujuan pembentukan EWarong. Kedua, tahap organizing pembentukan tugas pokok masingmasing bidang. Ketiga, tahap actuating, menggerakkan organisasi melalui peran sentral dari seorang ketua E-Warong. Keempat, tahap controlling pengawasan dan evaluasi oleh supervisor E-Warong.

B. Konsep Evaluasi Program

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu : *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per triwulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya

pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana.

Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan,
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran,
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (*externalities*)

Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu terdapat dua kegiatan dalam melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran dan membuat keputusan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriterianya.

Evaluasi merupakan rangkaian program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dilaksanakan dengan sadar untuk mengetahui sejauh mana tingkat suatu program mencapai keberhasilannya. Dalam kamus : 1. Program ialah rancangan. 2. Program merupakan suatu aktifitas yang dapat dijalankan. Melakukan evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang dicapai dalam hal atau tujuan yang telah direncanakan (Arikunto, 2013).

Pandangan Tyler (1950), ia mengatakan Evaluasi program merupakan rangkaian proses untuk menentukan apakah tujuan program telah tercapai. Selain itu, menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971), evaluasi program adalah upaya atau perilaku dalam memberikan informasi dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. (Arikunto, 2004).

Jones mendefinisikan evaluasi program adalah kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi serta kemanfaatannya dari segi jenis, teknik dan model. Stufflebeam mendefinisikan “ The Process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. (Fatin, 2016).

Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, ditarik simpulan bahwasannya evaluasi program merupakan salah satu aktifitas yang telah direncanakan guna mengetahui sejauh mana suatu program telah berjalan dan sejauh mana tingkat keberhasilan dari program tersebut, evaluasi bukanlah suatu program yang dapat dikatakan berhasil atau berjalan sebagaimana mestinya.

1. Tujuan Evaluasi Program

Berikut di bawah ini diterangkan tujuan dari evaluasi program berdasarkan pemikiran Muiyatiningsih (2011) :

- a. Menunjukkan kontribusi rencana terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Hasil evaluasi penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.

- b. Tentukan keberlanjutan prosedur, apakah perlu melanjutkan, meningkatkan atau bahkan menghentikan prosedur.

Sedangkan Arikunto (2004) memaparkan, ada dua dari tujuan sebuah evaluasi yaitu terbagi dalam tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum berarti program yang diarahkan secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus yang dimaksud adalah dalam proses pengevaluasian yang difokuskan pada masing-masing komponen.

Jadi, dari penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwasannya tujuan evaluasi program yakni guna melihat keadaan berkaitan dengan program yang akan dievaluasi. Sebabnya, dalam evaluasi program, pelaksanaan program yaitu melibatkan pikiran dan tindakan mengambil langkah untuk melaksanakan sebuah penelitian (Arikunto, 2004)

2. Manfaat Evaluasi Program

Evaluasi program dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan supervise. Secara singkat supervise adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan tinjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program merupakan suatu tahap pertama dalam supervisi, yakni dengan mengupayakan data-data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Evaluasi program adalah suatu langkah awal dalam sebuah proses akreditasi dan validasi sebuah lembaga (Arikunto, 2004).

Kegiatan evaluasi sangat berguna dalam sebuah langkah pengambilan keputusan untuk penentuan lanjutan pada program yang telah dijalankan. Wujud dari hasil evaluasi adalah rekomendasi dari seorang evaluator dalam langkah

mengambil sebuah keputusan. Berikut empat hal yang mungkin diambil dalam mengatur kebijakan dalam suatu program keputusan:

- a. Menghentikan sebuah program, karena dilihat bahwasannya program tersebut tidak memberikan manfaat atau tidak terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- b. Merevisi sebuah program, dari hal-hal yang tertuang dalam sebuah program ada beberapa bagian tidak sesuai keinginan sehingga dilakukan revisi atau memperbaiki dari kesalahan yang ada meskipun hanya sedikit.
- c. Melanjutkan program, setelah berjalannya suatu program maka hasil yang diperoleh menunjukkan segala sesuatu terkait proses berjalannya suatu program dan apakah program tersebut telah berjalan serta memberi manfaat yang dikehendaki.
- d. Menyebarkan sebuah program dengan cara menjalankan suatu program di wilayah tertentu dan pada waktu yang berbeda, karena program tersebut berhasil dengan baik sehingga program tersebut sangat diharapkan dengan baik untuk melakukan kembali program tersebut di waktu dan tempat yang berbeda.

3. Sasaran Evaluasi Program

Guna mengetahui sasarnya, maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang evaluator adalah dengan mengenali terlebih dulu tentang program yang hendak dijalankan, terutama komponen. Karena hal itu adalah hal yang utama dari suatu program. Tujuan umum dari sebuah program harus dijabarkan menjadi sebuah tulisan khusus maka sasaran dari evaluator akan diarahkan pada komponen

agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Untuk itulah seorang evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi komponen program yang akan dievaluasi.

4. Model Model Evaluasi Program

Model-model evaluasi program memang tampak memiliki banyak variasi, akan tetapi maksud dan tujuan dari suatu program itu pada dasarnya sama yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objeknya. Yang kemudian langkah selanjutnya dalam pengevaluasian adalah setelah informasi terkumpul, hal selanjutnya yakni memberikan informasi tersebut pada pihak pengambilan putusan yang sudah dievaluasi dengan cara yang tepat (Muryadi, 2017).

Berdasarkan Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi program dalam delapan model evaluasi (Arikunto, 2004) sebagai berikut :

a. Goal Oriental Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler

Model ini adalah bentuk dari model pertama dan yang menjadi objek atau tujuan dari program yang telah ditetapkan jauh sebelum program ini diberlakukan atau dilaksanakan. Berikut beberapa tahapan yang harus dijelaskan:

1. Tentukan tujuan rencana yang akan dilaksanakan
2. Jelaskan setiap gol dalam bentuk gaya berpakaian, sikap, dan konten.
3. Tentukan target penggunaan.
4. Tentukan arah yang akan diambil oleh situasi representatif.
5. Tentukan arah untuk mendapatkan hasil evaluasi.

Tyler mendefinisikan evaluasi sebagai suatu alat banding antara hasil yang diharapkan dan hasil yang didapatkan secara nyata. Menurut (1951) penilaian dalam sebuah program harus dapat memberikan nilai pada behaviour murid, pada suatu perubahan dari tingkah laku yang dikehendaki (Muryadi, 2017).

b. Model Free Evaluation Model (GFE), dikembangkan oleh Scriven

GFE pertama mula dikenalkan oleh Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven tahun 1972, model ini dapat dikatakan tidak sama dengan model yang dijelaskan di atas yang dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator harus memantau secara kontinu apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan, sejak awal berjalannya program hingga proses berjalannya yang dilihat secara terus menerus. Sedangkan untuk model GFE justru berlawanan dari tujuan program.

Model Goal Free Evaluation yang dimaksudkan disini adalah yang bertindak sebagai evaluator atau penilai dari suatu program dengan cara mengambil dan mengumpulkan laporan-laporan atau catatan-catatan dari adanya sesuatu yang mempengaruhi secara ril. Dalam model evaluasi ini terkhusus untuk diberi perhatian secara tepat terhadap usulan-usulan tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam bentuk proses atau produk. Keuntungan dari Program GFE adalah dengan model GFE para evaluator atau yang bertindak sebagai pemberi nilai dapat mengetahui antipasti yang perlu dilakukan dalam menghadapi adanya

sesuatu yang mempengaruhi tujuan pokok dari penilaian yang menyimpang (Muryadi, 2017).

- c. **Formatif Summatif Evaluation Model**, dikembangkan oleh Michael Scriven

Evaluasi Formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan sedang berlangsung, evaluasi formatif bertujuan guna melihat seberapa jauh program yang direncanakan dapat bertahan, dalam proses ini evaluator juga dapat mengetahui dan mengidentifikasi hambatan dari program yang berlangsung. Dengan diketahuinya hambatan dari suatu program dan hal-hal yang menjadikan suatu program tidak berjalan dengan baik, pengambilan sebuah keputusan yang bersifat terlalu cepat akan memicu adanya evaluasi program.

Evaluasi Sumatif adalah proses evaluasi program yang dilakukan ketika kegiatan atau program telah berakhir, tujuan dari evaluasi ini yakni untuk pengukuran npada level pencapaian suatu program. Fungsi dari evaluasi sumatif ini adalah dengan dalam pelaksanaan evaluasi program adalah pembelajaran yang dimaksudkan adalah sarana untuk mengetahui posisi dari sebuah individu atau kelompok, mengingat bahwa yang menjadi sasaran objek dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, maka yang menjadi lingkup sasaran yang akan dievaluasi juga berbeda (Mardilah, 2019).

- d. **Countenance Evaluation Model**, dikembangkan oleh Stake

Model evaluasi ini secara garis besar mengacu pada dua hal pokok dalam proses evaluasinya yakni dengan penjelasan dan pertimbangan. Model ini pula dapat menjadi pembeda antara tiga tahap dalam proses evaluasi sebuah program, yaitu antaseden yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses dan keluaran yang diartikan sebagai hasil, yang kemudian untuk deskripsi dan pertimbangan merupakan suatu langkah yang akan diambil dalam proses atau selama berjalannya suatu proses pengevaluasian suatu program (Mardilah, 2019).

Dalam mendeskripsikan atau menggambarkan hal yang berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan proses berjalannya suatu program, yaitu dengan mengetahui tujuan yang diharapkan oleh program, dan sebab-akibat atau hal-hal yang sungguh terjadi terjadi dalam proses evaluasi. Selanjutnya pada langkah pertimbangan dalam proses pengevaluasian adalah harus berdasarkan dan mengacu pada standard yang ditetapkan.

Berdasarkan Stake, evaluator dalam pertimbangannya dapat membandingkan hal-hal di bawah ini (Arikunto, 2004) :

1. Bandingkan kondisi evaluasi dan hasil program tertentu dengan objek sasaran yang sama dengan kondisi dan hasil yang terjadi pada program lain.
2. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bandingkan kondisi dan hasil pelaksanaan rencana dengan standar rencana yang relevan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka ditarik simpulan bahwasannya Countenance Evaluation Model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Stake. Model evaluasi program ini mengacu pada 2 hal utama dalam melaksanakan evaluasi program, yakni deskripsi dan pertimbangan yang didalamnya ada 3 hal yang menjadi objek sasaran evaluasi suatu program yang harus dievaluasi oleh evaluator 3 hal tersebut, yakni anteseden yang berarti konteks atau masukan, transaksi berarti proses dan outcomes yang bermakna hasil (Arikunto, 2004).

e. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake

Berdasarkan Stake (1967) berikut kriteria dalam model evaluasi yang responsif (Kosim, 2016), antara lain :

1. Lebih mengarah pada kegiatan program (proses) daripada tujuan dari suatu program.
2. Memiliki keterkaitan yang banyak dengan berbagai tingkatan atau kelompok untuk memperoleh hasil evaluasi.
3. Perbedaan nilai perspektif dari banyaknya perorangan yang jadi tolak ukur dalam mengungkapkan gagal dan berhasilnya suatu program.

Pendekatan ini merupakan system yang mengabaikan hal-hal yang menajdi kebenaran dalam proses evaluasi dengan keinginan dapat memberikan peningkatan dalam hasil evaluasi kepada setiap orang atau program itu sendiri. Model evaluasi ini dilakukan berdasarkan dasar pemikiran dari individu dalam

memberikan penilaian pada suatu perkara dan dipaksa bekerja secara lebih keras untuk memastikan bahwa individu mampu memberikan nilai pada setiap perkara.

f. CSE-UCLA Evaluation Model dikembangkan Oleh Alkin

Ciri-ciri dari model ini yakni membagi evaluasi program dalam 5 langkah yang perlu dilaksanakan dalam proses evaluasi diantaranya yakni dengan merencanakan, mengembangkan, penerapan dan hasil serta akibat. Fernandes (1984) menjelaskan suatu model CSE dalam 4 langkah (Kosim, 2016) sebagai berikut :

1. Needs Assessment, yaitu evaluator yang menempatkan perhatian pada pusat pemilihan masalah.
2. Program Planning yaitu seorang evaluator merampungkan data secara langsung tentang tentang suatu proses mengetahui dalam menentukan pemenuhan keinginan yang telah diidentifikasi.
3. Summative Evaluation adalah seorang evaluator agar kiranya dapat memfokuskan perhatian dalam proses berjalannya suatu program.
4. Sumatif Evaluation, adalah seorang evaluator mampu mengumpulkan hal-hal yang merupakan hasilnya dan dampaknya yang diberikan dari suatu program.

g. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam

Model ini bertumpu pada pemikiran dengan tolak ukur pencapaian suatu program yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : ciri dan kondisi lingkungan sekitar obyek yang akan dievaluasi, keinginan yang hendak diraih oleh program terencana, cara dan prosesnya. Berikut di

bawah merupakan tujuan dari diadakannya evaluasi berdasarkan pikiran Stufflebeam:

1. Menentukan dan menyiapkan informasi yang berguna dalam memberikan penilaian untuk menetapkan sebuah keputusan.
2. Menolong audience dalam memberikan tanggapan dan nilai dalam menyebarkan kegunaan dari suatu program.
3. Membantu mengembangkan dari suatu kebijakan dan program.

Stufflebeam (1967) mengemukakan bahwa CIPP diambil dari gabungan kata dari Context evaluation (evaluasi konteks), input evaluation (evaluasi masukan), process evaluation (evaluasi proses), product evaluation (evaluasi terhadap evaluasi) (Kosim, 2016).

g. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provos

Provos (1971) mendefinisikan evaluasi adalah sebagai alat yang digunakan membantu dalam mempertimbangkan minus dan plus suatu objek tertentu (Arikunto, 2004). Model ini diharapkan mampu melakukan pendekatan formatif dengan berpatokan pada sistem yang telah dianalisis. Sementara hasil yang diinginkan adalah mengarah kepada apakah sebenarnya tujuan yang terlaksana. Dalam model evaluasi ini, kebanyakan sumber informasi yang didapatkan tidak sama dari hasil dianalisis. Adapun cara dalam mengevaluasi program menggunakan model Discrepancy Model (Kosim, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kesuksesan suatu program melalui perencanaan dengan bentuk penilaian.
2. Meringankan pihak pengurus dengan memastikan sumber yang dibutuhkan telah terpenuhi melalui penilaian input.
3. Menilai, memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan dengan mulus dan bermutu dengan kualitas yang dimiliki suatu program sesuai hasil yang diinginkan.
4. Dalam menilai hasil, ditentukan judgement pada tahaan pertama dari tujuan yang terencana di awal.

Dari pemaparan beberapa teori di atas maka ditarik simpulan bahwasannya evaluasi program merupakan tindakan guna memberikan penilaian pada proses berjalannya suatu program dari sebuah kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya dari sebuah program. Dengan melakukan sebuah evaluasi maka evaluator dapat mengambil sebuah tindakan apakah sebuah program yang berjalan akan dihentikan, direvisi, dilanjutkan untuk mendapatkan manfaat atau bahkan menyebarkan sebuah program apabila sebuah program memang telah berjalan dengan baik, agar program yang terlaksana dengan baik juga dapat memberikan manfaat yang sama pada orang berbeda di waktu yang tidak sama pula. Dalam mengevaluasi sebuah program, yang menjadi sasaran dari program yang akan dievaluasi bukan hanya program secara keseluruhan saja tapi juga melibatkan komponen-komponen yang memiliki keterkaitan dengan program yang dilaksanakan.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Todaro dan Stephen C. Smith).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2014).

Pada kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kesejahteraan hanya sekitar 2 persen. Adapun pada 20 persen kelompok berpenghasilan tinggi, kenaikan kesejahteraan di atas 8 persen (Kompas, 2014). Artinya, kelompok miskin menerima lebih sedikit manfaat pembangunan dibandingkan dengan kelompok tidak miskin. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keadaan seperti ini menimbulkan suatu masalah pembangunan baru di negara-negara sedang berkembang, yakni gejala enggannya masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Apabila kita kaji rencana pembangunan yang ditulis para perencana pembangunan di negara yang sedang berkembang maka satu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa semua perencana pembangunan itu melihat bahwa industrialisasi adalah dewa penyelamat dari masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara itu.

Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak kantong-kantong orang miskin (Yustika, 2009). Sayangnya, pengembangan sektor industri secara besar-besaran yang digerakkan oleh pemerintah justru mengalami kegagalan, padahal kebijakan khusus telah diberikan, misalnya subsidi, tata niaga, lisensi dan monopoli. Sebaliknya, akibat

kebijakan khusus tersebut, sektor industri yang dikembangkan struktur pasarnya menjadi sangat terkonsentrasi.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Meminjam perspektif Soedjatmoko, humanis dan intelektual bebas pada zamannya, sebagaimana dikutip Sahrasad (2012), bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal paling penting dari suatu bangsa, lebih dari pemilikan sumber daya alam. Nasionalisme baru berbasis kualitas itu yang membuat manusia Indonesia bisa bermartabat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa lain.

Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan modern, kecakapan ilmu dan teknologi merupakan proses belajar yang harus dilakukan seumur hidup bila bangsa kita hendak survive dalam globalisme yang mencekam dan memangsa bangsa-bangsa yang lemah atau rentan karena kurangnya pendidikan. Bagi Indonesia nasionalisme baru yang berbasis pada ilmu-teknologi, moralitas dan kemanusiaan, merupakan pembentuk identitas kebangsaan yang kokoh dan kenyal.

Nasionalisme baru lebih menekankan tindakan nyata, peduli dan jujur untuk kepentingan nasional dan bangsanya, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Di era globalisasi ini, banyak pihak cemas dan khawatir bahwa para elite bisnis di Indonesia, menjadikan nasionalisme baru sebagai alat untuk mencapai kepentingan sempit dan tujuan tertentu, misalnya para pengusaha berinvestasi di luar negeri hanya karena meminimalkan resiko jika terjadi huruhara di Jakarta dan kota lainnya. Apalagi selama ini, perspektif "nasionalisme resmi" (official nationalism) lebih dominan karena menjadi wacana elite penguasa, pengusaha dan pejabat Negara (Saharsad, 2012).

Oleh karena itu, nasionalisme baru harus ditafsirkan sebagai sebuah kekuatan inklusif dan membebaskan. Meminjam bahasa Anthony Smith, segala bentuk, bentuk lokalitas wilayah, dialek, adat istiadat dan klan terpinggirkan. Atas nama nasionalisme, terbentuklah sebuah negara bangsa yang besar, yang mampu memusatkan pasar, sistem administrasi, perpajakan, dan pendidikan. Semangatnya adalah kerakyatan dan demokratis. Melalui nasionalisme, segala bentuk sistem nilai yang feodalistik dan kekuatan penjajah yang opresif berpeluang untuk dijungkalkan.

Nasionalisme baru itu, pada gilirannya menjadi modal bagi lahirnya kedaulatan rakyat serta penentuan nasib mereka secara independen. Nasionalisme baru merupakan kontinuitas ("some improvement") atas nasionalisme lama di abad ke-19 dan 20-an yang dimanifestasikan dalam gerakan elite pribumi melawan penguasa kolonial serta berbagai sistem administrasi yang mendukungnya. Bagaimanapun, meminjam perspektif Anthony D. Smith

sebagaimana dikutip Sahrasad (2012), teori nasionalisme mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tergantung pendekatan apa yang digunakan.

Pandangan yang mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah entitas yang konkrit, yang didasarkan pada latar sejarah dan kehidupan sosial, masyarakatnya homogen dan bersatu, serta mencerminkan aktor sosial dan politik utama dalam dunia modern, dalam tiga puluh tahun terakhir ini, nampaknya tidak lagi dapat dipertahankan. Pikiran baru mengenai nasionalisme semacam itu mengindikasikan bahwa monopoli interpretasi dan sentralisasi pengertian tentang nasionalisme harus digantikan oleh demokratisasi pemahaman secara lebih substansial.

Di sini nasionalisme baru memiliki relevansinya dengan dinamika situasi. Dengan demikian, maka konsep pembangunan harus didasarkan ontologi analisis ekonomi-politik yang multi disiplin. Dewasa ini para teknokrat kabinet Reformasi yang terjebak pada ontologi ekonomi NeoKlasik yang tunggal dimensi, yaitu dari aspek tekno-ekonomi semata. Oleh karena itu, kaum teknokrat tidak mampu melihat persoalan ekonomi yang sebenarnya. Mereka tidak mampu melihat bahwa hingga kini, perekonomian Indonesia masih berada dalam sindrom tiga ketergantungan, modal, teknologi dan perdagangan (Rahardjo, 2014).

Sosiolog Naim (2011) mengabarkan bahwa yang ditonjolkan selama ini hanyalah "apa dan bagaimana serta dengan hasil capaian berapa, secara makro, lalu dibagi dengan jumlah penduduk", tetapi tak pernah "oleh siapa dan untuk siapa, menurut jalur pelapisan sosial". Padahal struktur masyarakat kita sangat berlapis dan bertingkat, bahkan cenderung dualistik dan dikotomi. Celakanya, pelapisan dan dualisme ataupun dikotomi sosial itu, seperti pada zaman kolonial

dulu, cenderung etnosentrik dan etno-bias pula sifatnya. Artinya, kelompok terkecil masyarakat menurut jalur etnik itu, yang umumnya adalah nonpribumi, menguasai bagian terbesar kekayaan nasional.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penangan kemiskinan masih terus menerus dikembangkan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004:132). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang N0. 24 Tahun 2014, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004 : 1-6) membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat proklamasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan Sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

D. Konsep Program E-Warong

E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. KUBE Jasa adalah kelompok usaha bersama yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang

jasa untuk mendirikan serta mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Maksud dari elektronik adalah bahwa pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut menggunakan sistem gesek dengan bantuan alat dan mesin EDC yang diberikan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) khususnya Bank BNI yang melayani seluruh wilayah kota/kabupaten. Sedangkan gotong royong di sini adalah dimaksudkan bahwa karena pendirian E-Warung (elektronik warung gotong royong) berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat maka sifatnya gotong royong dipikul bersama dengan seluruh pengurus.

Warung gotong royong elektronik (E-warung) merupakan istilah yang digunakan dalam program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur yang sudah ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM), yaitu pasar tradisional, warung kelontong, E-warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE), warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.

Fungsi E-Warung ialah untuk menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga; Agen bank penyalur bantuan sosial non-tunai; tempat pemasaran hasil produksi KUBE; serta tempat layanan koperasi simpan pinjam. Elektronik warung gotong royong (e-Warung) merupakan program bantuan sosial sebagai bentuk sinergi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). E-Warung melayani

transaksi pembelian bahan pangan pokok bersubsidi, gas LPG 3 kg, pembayaran listrik, pupuk, serta program subsidi lainnya.

Harga bahan pangan yang dijual melalui e-Warong cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Penerima manfaat bantuan sosial juga dapat bertransaksi di E-Warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program yang telah diluncurkan sejak 2016 tersebut diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan membantu pengentasan kemiskinan. Pengelola E-Warong adalah anggota dari KUBE PKH yang membuka toko kelontong di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga. Sementara itu, pasokan barang berasal dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang pengemasannya menjadi kemasan kecil dilakukan oleh warga sekitar.

Untuk memperoleh BPNT, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh setiap KPM adalah mereka yang tergolong dalam kondisi kesejahteraan sosial ekonomi dalam taraf 25% terendah yang bersumber dari DT PPFM, daftar penerima KPM BPNT ditentukan dan diseleksi oleh Kementerian Sosial setiap bulan November, setelah itu daftar KPM akan diberikan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial, yang kemudian akan diverifikasi. Setelah data KPM diverifikasi maka penerima bantuan akan dibuatkan buku rekening di bank dan akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera atau dalam BPNT dikenal dengan nama Kartu Kombo, sebagai kartu elektronik yang akan digunakan untuk menebus pangan yang berupa beras dan telur sebagai bantuan pokok dan sayuran, buah-buahan, nabati dan kacang-kacangan sebagai bantuan tambahan(Hikmawati, 2019).

Kartu kombo sebagai instrumen pembayaran dengan saldo Rp 200.000/KPM dalam setiap bulannya, Kartu Kombo berfungsi sebagai e-wallet atau dompet, dengan mempunyai fitur e-wallet merupakan uang elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan kepada pihak e-warong akan tetapi tidak dapat ditunaikan atau dalam bentuk uang. Dengan penyaluran BPNT diharapkan dapat memberikan kendali penuh pada setiap KPM untuk menentukan sendiri mutu dari bahan pangan yang akan dibeli, dan dengan adanya program ini mendorong usaha eceran rakyat dalam meningkatkan jumlah pelanggan (Hikmawati, 2019)

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan 4 pangan yang dimaksudkan di atas adalah karbohidrat (beras, jagung pipilan, sagu), protein hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar), protein nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe) dan sumber vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan). Bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat berupa beras 10 Kg, telur 30 butir, dan buah pir 8 buah. Awalnya, pada tahun 2017 bantuan BPNT ialah Rp. 110.000/KPM/bulan Kemudian berubah menjadi Rp. 150.000/KPM/bulan pada bulan Januari 2020, dan pada bulan Maret 2020 berubah lagi menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan.

Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur BPNT. Koordinasi Pelaksanaan :

1) Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3) Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong. Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

2. Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a. Jumlah pengurus Peyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.
- b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
- c. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur
- d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota
- e. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda

- f. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

3. Persiapan E-Warong

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa/ kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 - 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
 - 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani

- 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
 - 4) Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
 - 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.
4. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi
- Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.
- 1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:
 - a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
 - b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
 - c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.
 - 2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:
 - a) Kementerian atau Lembaga terkait.
 - b) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
 - d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya

5. Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
7. Pemilik atau Pengelola e-warong.
8. Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.
9. Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:
 - a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) Pemilik/Pengelola e-warong.
 - d). Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

- 1) Proses 1 : Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.
 - 2) Proses 2 : Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.
 - 3) Proses 3 : Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.
10. Penyaluran Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:
- 1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
 - 2) Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
 - 3) Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
 - 4) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.

- 5) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
 - 6) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
 - 7) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
 - 8) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
 - 9) Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.
- g. Pemanfaatan Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :
- 1) Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
 - 2) Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
 - 3) Pilih; Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.

- 4) Terima; Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan

Kabupaten Gowa menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 38.558 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Mereka terdiri dari 23.814 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan 14.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 110.000 setiap bulannya,”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui E-Warong atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BNI.

Saat ini telah tersedia 114 agen yang telah disebar di Gowa. Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada E-Warong. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Gowa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Amir, 2018)

E. Kerangka Fikir

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meluncurkan program Elektronik Warung Gotong Royong atau E-Warong. E-Warong merupakan program bantuan sosial untuk masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari upaya meningkatkan kesejahteraan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai Program E-Warong ini secara khusus diluncurkan untuk mencegah distribusi bantuan pemerintah yang tidak tepat kualitas, kuantitas dan sasaran. Untuk mengkaji lebih jauh tentang inovasi E-Warong maka penulis menggunakan teori dari Stake (1984) yang digambarkan sebagai berikut :



F. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi program elektronik warung gotong royong (E-Warong) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan menggunakan teori dari Stake merujuk pada indikator Proses dan Hasil.

G. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Proses merupakan tahap pelaksanaan yang dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi pada sebuah program. Evaluasi di sini untuk melihat bagaimana proses implementasi Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.
2. Hasil yang dimaksudkan adalah setelah melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam mengevaluasi, bagaimana hasil yang didapatkan oleh seorang evaluator apakah sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan atau tidak memenuhi tujuan yang ditargetkan. Apakah hasil yang diperoleh setelah melakukan evaluasi program E-Warong di lapangan,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan dengan lokasi penelitian ada di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dan dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu. Dalam hal ini terkait dengan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai proses dalam melihat evaluasi program E-Warong di serta data-data lain yang dibutuhkan dalam melengkapi penyusunan skripsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang ditentukan oleh peneliti yang akan memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, atau dikenal dengan teknik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari tau siapa tokoh yang memiliki pengetahuan yang mapan terkait masalah yang diteliti.

Teknik penentuan informan dalam hal ini ditempuh dengan mencari pihak yang terlibat langsung dengan program E-Warong, dalam hal ini adalah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat dan Pihak jajaran pemerintah yang langsung terlibat di dalamnya. Seperti itulah proses penentuan informan hingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun informan dalam ,penelitian ini adalah :

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Alimuddin R, S.Sos	AR	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1
2	Suherman Syam	SS	Pendamping Bantuan Sosial	1
3	Syaifatul Husna	SH	Pengelola E-Warong	1
4	Suriani	SU	Keluarga Penerima Manfaat	1
5	Tanang	TA	Keluarga Penerima Manfaat	1
Jumlah Informan Keseluruhan				5

Tabel 1

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat kondisi dan realitas secara langsung di lapangan. Dengan teknik ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai basis penelitian yang berlokasi di wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian, serta mencari lain tentang permasalahannya dengan orang-orang sekitar tempat penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berupa pertanyaan lisan dengan tetap merujuk pada pedoman wawancara yang ada dan jawaban informan dijawab secara kisan.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terpilih sebagai sebuah teknik untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan masalah yang diteliti agar peneliti dapat memperoleh data untuk mendukung validitas hasil penelitian yang dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar dalam bentuk laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, dalam mengorganisasikan data, serta memilah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mengintesis dan menemukan pola, serta apa yang penting dan untuk dipelajari sehingga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012:248)

1. Reduksi Data

Merupakan proses dalam seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data yang kasar yang dilaksanakan dalam penelitian dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dimulai dari sebelum pengumpulan pelaksanaan penelitian pada saat pengumpulan data berlangsung.

2. Penyajian Data

Sajian singkat adalah suatu informasi dari yang dapat memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan. Melihat suatu penyajian data tersebut, peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi serta untuk mengerjakan suatu analisa atau suatu tindakan lain berdasarkan tindakan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan kegiatan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Akan tetapi kesimpulan itu masih bersifat sementara sampai penelitian berakhir baru dapat diambil kesimpulan yang sesungguhnya. Jika laporan penelitian mengalami kesulitan, maka diadakan proses pengumpulan data lagi dari awal sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan.

G. Pengabsahan Data

Salah satu yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan dalam penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127) teknik pengumpulan data triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama pada teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karna sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, tim peneliti lain yang diberi tugas untuk pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah

yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan , Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Identitas Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa:

Nama Kantor : Dinas Sosial, Kabupaten Gowa
 Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Lantai II
 Kelurahan : Sungguminasa
 Kecamatan :
 Kabupaten : Gowa
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 No.Telpon : 0411-882272 / 0411-864024

1. Visi dan Misi Dinas Sosial

1. Visi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial merumreligius”.Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

- a. Kesejahteraan Masyarakat: Merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Yang dimaksud Keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut dilihat dari terpenuhinya hak-hak masyarakat, berhak atas pekerjaan penghidupannya berdasarkan atas pekerjaan dan keahlian gender, serta masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Secara kuantitatif kondisi ini di ukur dengan angka kemiskinan.

- b. Berkeadilan: Yang dimaksud yaitu sikap saling membantu antar sesama tanpa melihat agama, warna kulit, warna rambut, maupun usianya dan menjelaskan segala aturan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masyarakat yang bebas dari gangguan, tidak memihak dan tidak berat sebelah serta tidak condong. Secara kuantitatif Kondisi ini dapat diukur dari masyarakat yang tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender maupun wilayah.
- c. Religius : Yang dimaksud yaitu suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang di peluknya, bersikap toleran terhadap pelaksana ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang mengikuti aturan budaya keagamaan, masyarakat yang mengikuti ajaran agama, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Secara kuantitatif kondisi dapat di ukur dari tingkat partisipasi masyarakat

dalam mengikuti ajaran dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Sosial Kabupaten Gowa merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 4 (Empat) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 3. meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan.
 4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dijalankan dengan 1 tujuan yaitu: Meningkatkan penjangkauan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial.

Misi 2 :Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi Pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dijalankan dengan 1 Tujuan Yaitu: Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan, dijalankan dengan 1 tujuan, yaitu: Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan.

Misi 4 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

4. Struktur Organisasi :

- a. Kepala Dinas Sebagai Pemimpin Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
- b. Sekretaris Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dinas membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Kessos anak
 - 2) Seksi kessos lansia dan penyandang rehabilitasi

3) Seksi kessos tuna sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:

1) Seksi Pemberdayaan fakir miskin

2) Seksi perizinan dan pembinaan lembaga sosial

3) Seksi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan atau kejuangan

e. Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:

1) Seksi Advokasi dan perlindungan sosial

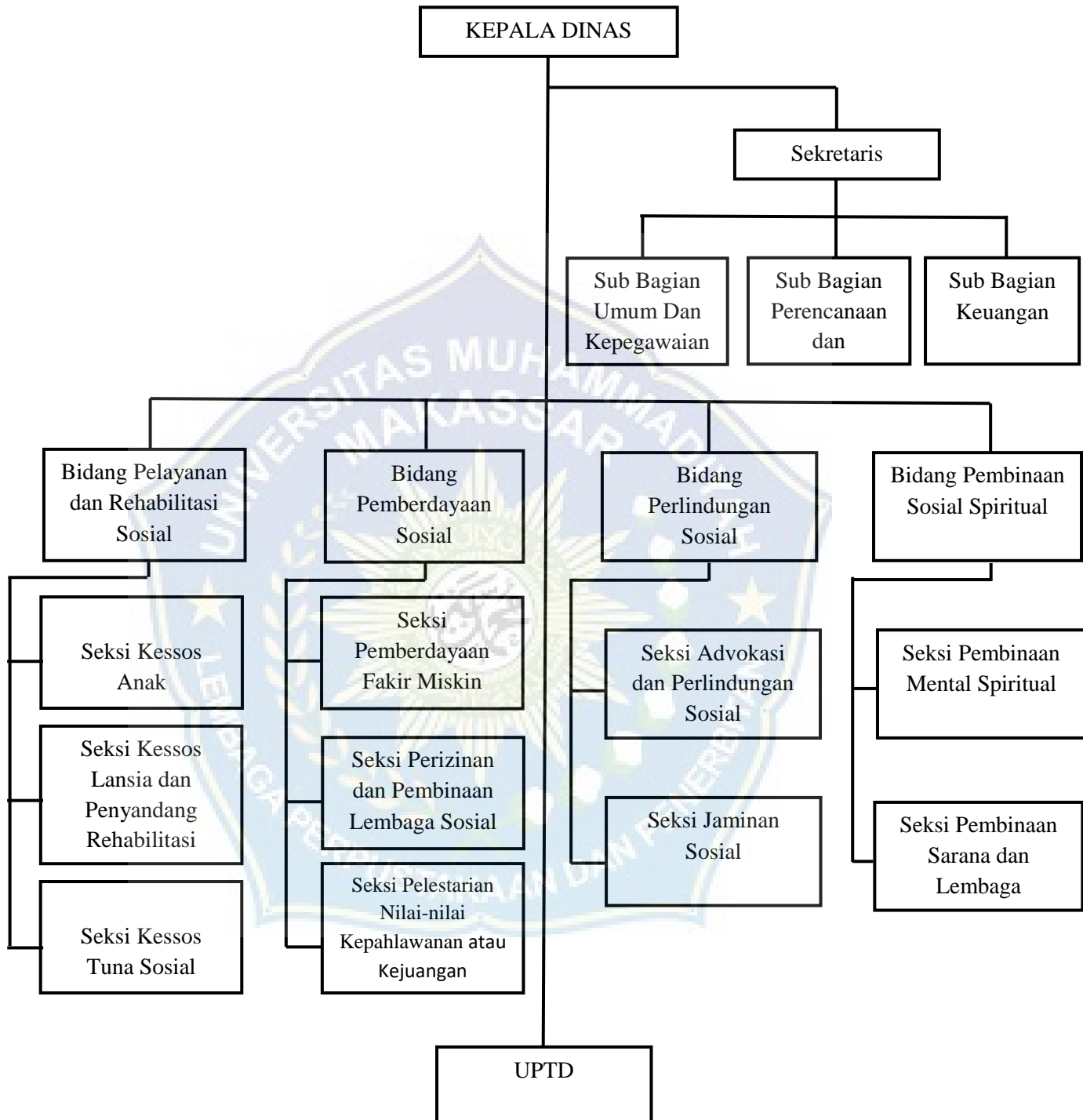
2) Seksi Jaminan Sosial

f. Bidang Pembinaan Sosial Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:

1) Seksi pembinaan mental Spritual

2) Seksi Pembinaan sarana dan lembaga

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa:



Tabel 2

B. Deskripsi Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kecamatan Parigi

Proses penyaluran bantuan pangan non tunai di kecamatan Parigi disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik sebesar Rp.200.000 yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau E-warong. Menurut perpres No. 36 tahun 2017, E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Meliputi; usaha mikro (kecil dan koperasi), pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warong KUBE, desa, rumah pangan kita (RPK), toko tani, agen layanan keuangan digital yang melayani penjualan bahan pangan.

Bank penyalur (BNI) mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak-pihak lain yang menjadi E-warong penyalur BPNT. Penetapan E-warong sepenuhnya merupakan wewenang bank penyalur (BNI) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi E-warong adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan prosedur bank penyalur (BNI).

2. Memiliki sumber daya penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
3. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antara agen/toko dengan pemasok atau distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
4. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
5. Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM lansia (Lanjut Usia) dan KPM disabilitas.

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank penyalur (BNI) untuk menetapkan sebuah E-warong, ini membuktikan bahwa implementasi program bantuan pangan non tunai akan berjalan lancar dan mudah dipantau oleh pihak bank penyalur (BNI) agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat penyaluran program BPNT.

Selain itu, untuk tugas dan fungsi TSKK dan pendamping BPNT di setiap desa adalah memberikan sosialisasi kepada KPM mengenai program BPNT dan menyiapkan data KPM, serta mengkoordinasi tempat dan waktu pecairan BPNT kepada KPM setiap bulannya agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program BPNT.

1. Bantuan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Pelaksanaan

Program bantuan pangan non tunai telah terealisasi dengan baik. Namun, sejauh ini pelaksanaan program bantuan pangan non tunai belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program telah dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan di kecamatan Parigi. Dengan demikian pelaksanaan bantuan pangan non tunai dapat ditinjau dari tindakan lapangan melalui pihak-pihak terkait.

2. Bantuan Pangan Non (BPNT) Tunai Dalam Aspek Evaluasi

Tindakan evaluasi menjadi hal penting dalam menindak lanjuti program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya program bantuan pangan non tunai. Efektif tidaknya suatu program secara langsung dapat terlihat melalui mekanisme evaluasi tertentu yang digunakan. Bahkan evaluasi hadir untuk menjawab berbagai kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program. Dalam hal bantuan pangan non tunai pemerintah sendiri telah melakukan evaluasi, bentuk evaluasi tersebut berupa pemutakhiran data yang dilakukan setiap tiga bulan. Pemutakhiran atau pembaharuan data tersebut bertujuan agar pemerintah bisa tahu data terbaru dari masyarakat agar penyaluran bantuan pangan non tunai benar benar tersalurkan kepada yang membutuhkan secara merata.

Peserta/penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017 KPM adalah Penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut

DT-PFM yang merupakan yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran bantuan sosial, kecamatan Parigi juga menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Gowa. Berikut table jumlah KPM per Kecamatan di Kabupaten Gowa :

No.	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Pattallassang	395
2.	Bontomarannu	554
3.	Bontonompo	2048
4.	Bajeng Barat	601
5.	Bontolempangan	509
6.	Parangloe	458
7.	Parigi	211
8.	Tompo Bulu	968
9.	Tinggimoncong	351
10.	Manuju	547
11.	Bontonompo Selatan	2047
12.	Bungaya	499
13.	Tombolo Pao	768
14.	Pallangga	2060
15.	Biringbulu	693
16.	Barombong	938
17.	Somba Opu	2040
18.	Bajeng	2045
Jumlah		17729

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Parigi memiliki KPM paling sedikit yaitu 221 orang. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan pangan non tunai di Kecamatan Parigi masih perlu ditingkatkan meskipun Kecamatan Parigi tidak menduduki posisi pertama sebagai Kecamatan

dengan jumlah KPM terbanyak namun pastinya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan dinas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

1. Evaluasi Program

Berikut proses evaluasi program yang dikemukakan oleh Stake melalui tahapan-tahapan dalam evaluasi yaitu transaction (proses) dan outcomes (hasil).

a. Proses

“Dulunya program ini bernama Beras Miskin (Raskin) yang muncul pada tahun 2002 kemudian ditebus dengan harga Rp 1.600/kg, kemudian pada tahun 2015 diubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra) oleh Menteri yang menjabat saat itu dengan pemikiran untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera yang saat itu mendapat subsidi sebesar Rp. 5000/kg. Kemudian pada tahun 2016 melalui rapat terbuka presiden membahas tentang penyaluran bantuan secara elektronik, sehingga terbitlah Peraturan Presiden pada tahun 2017 Nomor 63 yang mengatur tentang “ Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai”. Dengan adanya peraturan presiden tersebut, pada tahun 2018 diterbitkanlah Peraturan Kementrian Sosial No 18 tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan uang elektronik yang dikelola oleh E-Warong. (Wawancara dengan AR, 05/05/2021).

Berdasarkan anggapan informan di lapangan ditarik kesimpulan bahwa pada awalnya bantuan pangan ini bernama Raskin pada tahun 2002 yang ditebus dengan harga Rp. 1600/kg, kemudian pada tahun 2015 berganti menjadi Rastra yang mendapat subsidi Rp 5000/kg nya, dan pada tahun 2018 diubah lagi menjadi BPNT dengan uang elektronik dalam kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera.

“Pada tahap pertama, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 110.000 / bulan. Pada tahap kedua berubah menjadi Rp. 150.000/bulan. Pada saat wabah pandemi Covid 19 berubah lagi menjadi Rp. 200.000/bulan.” (Wawancara dengan AR, 05/05/2021)

Berdasarkan anggapan informan di lapangan ditarik kesimpulan bahwa bantuan yang diberikan awalnya sebesar Rp. 110.000/ bulan kemudian berubah Rp. 150.000/bulan dan pada tahun 2020 bertambah menjadi Rp.200.000/bulan selama adanya pandemi.

“Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Bantuan 4 pangan ialah karbohidrat (beras, jagung, sagu), protein hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar), protein nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe), dan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah-buahan).” (Wawancara dengan AR, 05/05/2021)

Berdasarkan anggapan informasi di lapangan ditarik kesimpulan bahwa bantuan sosial ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan keluarga penerima manfaat.

Pernyataan informan AR didukung oleh informan SS sebagai informan bahwa sebelum Program BPNT, ada program bantuan pangan lainnya dengan nama Rastra atau Beras Sejahtera dengan subsidi Rp 5.000/kg nya, dan sebelum Rastra nama bantuan pangan ini bernama Raskin. Sebagaimana telah dilakukan wawancara dengan SS sebagai informan pendukung sebagai berikut :

“namanya sekarang BPNT, dulu namanya itu Rastra, sebelum rastra namanya Raskin”. (Wawancara dengan informan pendukung SS/12/06/2021).

Selanjutnya wawancara dengan informan berikut :

“Bantuan pangan yang diberikan pemerintah memang telah ada sejak dulu, bantuan ini pada tahun 2002 bernama Beras Miskin (Raskin), kemudian pada tahun 2015 berubah nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra), beras Raskin dan Rastra bekerjasama dengan Bulog. Kemudian pada tahun 2018 keluar lagi Peraturan Kementerian tentang bantuan pangan dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai, yang disalurkan menggunakan kartu elektronik berisi uang elektronik juga, dan bantuan yang diberikan tidak hanya beras

tapi ada tambahan bantuan pangan lain seperti telur dan buah-buahan”.(Wawancara dengan AR/14/05/2021).

Sebagaimana anggapan informan dilapangan ditarik simpulan bahwa bantuan pangan memang telah lama diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan ini pada tahun 2002 bernama Raskin dan pada tahun 2015 berganti menjadi Rastra, yang mana penyalur bantuan pangan ini adalah Bulog, kemudian pada tahun 2018 keluarlah peraturan untuk menggantikan Program Rastra menjadi Program BPNT yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan program sebelumnya, dimana program Rastra hanya memberikan bantuan beras, untuk program rastra bantuan yang diberikan tidak hanya beras tapi juga telur dan buah-buahan.

“Dulu bantuannya namanya Beras Miskin atau Raskin, kemudian berganti lagi menjadi Beras Sejahtera atau rastra dengan subsidi Rp 5000/kg nya, jadi bantuan ini khusus untuk beras saja dan kita harus membayar untuk mendapatkan beras. Nah sekarang bantuan pangan berubah lagi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai, tapi bedanya kalau BPNT itu bantuannya tidak hanya beras akan tetapi ada juga bantuan telur, ikan, ayam, sayur dan kacang-kacangan, dan kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan pangan, cukup tukarkan kartu kombo pada E-Warong. Kartu Kombo itu berisi uang elektronik yang diberikan pemerintah sebesar Rp 200.000 dalam setiap kartu. (Wawancara dengan AR/05/05/2021).

Sejalan dengan anggapan informan di lokasi ditarik simpulan pada awalnya bantuan pangan bernama Raskin kemudian berubah lagi menjadi Rastra, bantuan yang diberikan berupa beras dan ditebus dengan sejumlah uang. Kemudian pada tahun 2018 bantuan ini berganti lagi menjadi BPNT yang memberikan bantuan berupa beras, telur, ikan, ayam, sayur dan kacang-kacangan dan tidak perlu ditebus dengan uang oleh penerima bantuan, cukup membawa kartu kombo yang

berisi uang elektronik yang diberikan oleh pemerintah setiap bulannya sebesar Rp. 200.000.

“bantuan pangan ini awalnya namanya Raskin, kemudian berubah menjadi Rastra, kemudian berubah lagi menjadi BPNT. Bantuan pangan dalam BPNT itu yang diberikan adalah beras 10 kg, telur 1 rak sebagai bantuan pokok kemudian ada bantuan tambahan seperti buah pir 8 buah (Wawancara AR/05/05/2021).

Anggapan narasumber di lokasi disimpulkan bahwasanya bantuan pangan non tunai telah berganti nama sebanyak 3 kali, yang awalnya bernama Raskin kemudian berganti Rastra dan sekarang menjadi BPNT. Akan tetapi dari pergantian program ini ada perbedaan yang ditemukan, untuk program sebelumnya hanya mendapatkan beras saja sedangkan BPNT ada tambahan seperti telur dan buah-buahan.

“Saya selaku Pendamping Sosial Pangan bertugas untuk mendampingi, mengadvokasi serta memberikan penyuluhan tentang Program Keluarga Harapan dan BPNT. Kemudian melakukan pembinaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya untuk mengetahui dan mendengarkan keluhan KPM, karena biasanya ada yang tidak mendapatkan bantuan sosial pada periode tersebut. Biasanya dikarenakan data KPM tidak valid. (Wawancara SS/18/06/2021)

Pendamping Sosial Bantuan Pangan, terdiri atas :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non KPM Program Keluarga Harapan, dan
- b. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pendamping PKH) untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program Keluarga Harapan.

Bapak SS merupakan bagian dari TKSK, dalam pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyalurannya dilakukan dengan cara melakukan koordinasi

dengan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/lurah mengenai pelaksanaan BPNT, kemudian sebagai pendamping bantuan pangan harus dapat membantu Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT serta juga dapat membantu dalam pembuatan jadwal distribusi BPNT, tugas selanjutnya adalah dapat membantu Dinas Sosial daerah kabupaten/kota menyusun laporan penyaluran BPNT serta melakukan sosialisasi BPNT kepada KPM BPNT, sebagaimana tugasnya pendamping sosial bantuan pangan maka harus mendampingi KPM BPNT selama penyaluran BPNT, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

“Tugas saya sebagai pendamping sosial Kecamatan ialah memberikan informasi terkait pertemuan, pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk untuk diambil di E-Warong, serta informasi-informasi lainnya mengenai program E-Warong.(Wawancara SS/18/06/2021)

Pendamping BPNT memiliki tugas :

- a. Koordinasi : Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah mengenai pelaksanaan penyaluran dana BPNT.
- b. Data : Membantu dinsos melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT.
- c. Jadwal Distribusi : Membantu dinsos membuat jadwal distribusi bantuan.
- d. Laporan : Membuat laporan penyaluran BPNT.
- e. Sosialisasi ke KPM BPNT.
- f. Mendampingi KPM BPNT : Mendampingi selama penyaluran.

g. Pemantauan Pelaksanaan. Sebagaimana anggapan narasumber SS mengemukakan bahwa selaku koordinator Kecamatan telah menjalankan tupoksi sebagai pihak penyalur bantuan, BPNT disalurkan di lokasi kabupaten/kota hingga ke setiap E-Warong yang memiliki fasilitas jaringan komunikasi/internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT serta bantuan sosial lainnya.

Persyaratan BPNT adalah KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. KPM yang diutamakan adalah peserta Program Keluarga Harapan. Daftar KPM BPNT paling sedikit memuat informasi sebagai berikut : Nama Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus, Alamat Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus, Tanggal Lahir Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus, Nomor Induk Kependudukan Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus, Nama Gadis Ibu Kandung Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus, dan ID BDT Pasangan Kepala Keluarga/Istri/Pengurus.

Yang berhak mendapatkan BPNT adalah mereka yang tergolong dalam Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, daftar KPM BPNT disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tim Koordinasi Bansos Pangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Setelah data diperoleh dari Kemensos maka pihak penyalur akan memverifikasi data terlebih dahulu apakah yang terdaftar dalam penerima bantuan apakah memang benar layak atau tidak layak menerima bantuan.

“Berdasarkan kebijakan tersebut dalam memudahkan layanan masyarakat sehingga setiap desa ditetapkan agen e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang ditentukan oleh BNI (Bank Negara Indonesia). E-warong memang telah menyediakan beras kualitas premium sehingga kualitas beras yang didapatkan oleh penerima bantuan adalah kualitas bagus. Selain itu, untuk lebih memudahkan masyarakat penerima bantuan yang tidak bisa datang mengambil bantuan tersebut maka dapat diwakilkan dengan catatan kartu kombo harus dibawa, tingkat kecurangan akan sangat kecil karena kartu kombo ini seperti atm yang juga memiliki chip dan sandi yang mana hanya pemilik kartu yang mengetahui pinnya. Dan apabila bantuan tidak sempat diambil pada bulan terjadwal maka dapat diambil pada bulan berikutnya sehingga bantuannya dobel karena bulan sebelumnya tidak diambil”. (Hasil wawancara dengan Koordinator penyalur BPNT Kab. Bantaeng, Bapak SS 09/06/2020).

Berdasarkan jawaban yang dipaparkan dari hasil wawancara dengan bapak Suherman Syam maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPNT lebih memudahkan masyarakat, karena dapat diwakili apabila yang menerima bantuan apabila si penerima tidak bisa mendatangi e-warong. Selain itu pembayarannya yang menggunakan kartu kombo yang menyerupai ATM maka dapat meminimalisir tingkat kecurangan karena sandi kartu kombo hanya diketahui oleh pemilik kartu. Selain itu yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar terdaftar sebagai masyarakat kurang mampu berdasarkan DTKS serta menggunakan kartu elektronik jadi tidak bisa terjadi penggantian nama penerima bantuan, sebagaimana beberapa kasus yang terjadi dalam penyaluran Rastra.

“Untuk mendapatkan bantuan pangan hanya mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat untuk menerima bantuan yang kemudian akan diseleksi oleh Kementerian Sosial yang layak menerima bantuan dan tidak dipungut biaya. (Wawancara TA, 18/06/2021).

Sebagaimana anggapan narasumber di lapangan disimpulkan penerima BPNT hanya mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan, dan juga diseleksi oleh Kementerian Sosial dan terdaftar dalam data Kementerian

Sosial dan terdaftar dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 atau 25% kelompok masyarakat yang memiliki perekonomian terendah.

“Tempat untuk berbelanja BPNT hanya dapat dilakukan di E-Warong dengan membawa kartu kombo sebagai alat untuk berbelanja yang berisi uang elektronik sejumlah Rp 200.000/KPM yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur sebagai bantuan pokok dan buah-buahan. (Wawancara dengan SH Pengelola E-Warong, 18/06/2021).

Sejalan dengan anggapan narasumber ditarik simpulan bahwa tempat untuk menerima BPNT adalah E-Warong dengan membawa kartu kombo sebagai alat berbelanja yang berisi uang elektronik Rp 200.000/KPM. Bantuan yang didapatkan adalah beras dan telur sebagai bantuan pokok dan buah-buahan

Dari seluruh hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menerima BPNT adalah yang mengumpulkan KK dan KTP dan terdaftar dalam data Kementerian Sosial yang kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial dan terdaftar sebagai Desil 1 dan Desil 2 atau 25 % tingkat kemiskinan terendah masyarakat setempat. Alat pembayaran yang akan ditukarkan pada E-Warong adalah kartu kombo yang berisi uang elektronik sebesar Rp 200.000/KPM. Bantuan yang diberikan kepada setiap KPM adalah beras dan telur sebagai bantuan pokok dan bantuan lainnya berupa buah-buahan. Dari hasil observasi dilapangan, yang penulis saksikan bahwa penerima bantuan melakukan belanja bahan pangan di E-Warong dengan menggunakan kartu kombo sebagai alat pembayaran bahan pangan berupa beras 10 Kg, telur 1 Rak, dan buah Pir 8 biji.

b. Hasil

“bantuan yang didapatkan sebesar 1 karung beras yang berjumlah 10 kg ditambah bantuan telur 1 Rak yang juga sebagai bantuan pokok. Kemudian ada bantuan tambahan buah-buahan. Berbeda dengan Program Rastra sebelumnya yang hanya memberikan bantuan beras dengan subsidi Rp.5000/kg nya sedangkan untuk BPNT tidak dipungut biaya hanya mengumpulkan KK dan KTP saja. (Wawancara dengan SH, 18/06/2021).

Sesuai anggapan informan di lapangan maka dapat disimpulkan bantuan yang diperoleh adalah beras 10 Kg dan telur 1 rak sebagai bantuan pokok dan ditambah bantuan lainnya berupa buah-buahan. Berbeda dengan Program Rastra yang hanya memberikan bantuan beras saja dan disubsidi sebesar Rp. 5000/kg nya, sedangkan untuk Program BPNT hanya mengumpulkan KK dan KTP dan tidak dipungut biaya.

“bantuan yang diberikan kepada setiap KPM adalah beras dengan kualitas premium yang mana UMKM sebagai penyedia beras yang kemudian akan diantarkan kepada e-warong yang kemudian akan dijual kepada KPM, begitupun dengan telur, telur yang diberikan adalah telur yang baru dan dipilih kualitas bagus sebelum diantarkan kepada e-warong, bantuan lainnya juga buah-buahan juga kualitas tinggi dan sehat karena baru dipanen. (Wawancara dengan SH, 18/06/2021).

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Syaifatul Husna dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan memiliki kualitas yang bagus, untuk bantuan beras memiliki kualitas premium, telur yang masih baru dan untuk buah-buahan juga memiliki kualitas yang tinggi karena masih segar dan mengandung vitamin yang tinggi karena baru panen.

“bantuan pangan ini diterima setiap bulannya, melalui info dari pengelola E-Warong kemudian penerima bantuan akan menerima BPNT di e-warong dengan membawa kartu kombo sebagai alat untuk berbelanja pangan menggunakan sistem perbankan sehingga lebih cepat pengambilan bantuannya. Akan tetapi jadwal penerimaan BPNT dalam setiap bulannya

tidak pasti apakah diterima di awal bulan, pertengahan atau akhir bulan. (Wawancara dengan SU, 18/06/2021).

Sebagaimana anggapan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa penerima BPNT diberikan setiap bulannya apabila telah ada pemberitahuan dari pengelola E-Warong mengenai jadwal penerimaan bantuan, kemudian KPM akan mendatangi e-Warong dengan membawa kartu kombo yang berfungsi sebagai alat pembayaran elektronik. Akan tetapi tidak ada jadwal pasti penerimaan BPNT dalam setiap bulannya. Kemudian transaksi yang dilakukan di e-warong menyerupai sistem perbankan, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

“bantuan ini sangat membantu kami yang tergolong kurang mampu dalam beban belanja rumah tangga, karena bantuan yang diberikan tidak hanya beras tapi juga ada bantuan tambahan seperti telur dan buah yang berkualitas dan mengandung vitamin yang tinggi. (Wawancara dengan TA/18/06/2021).

Sejalan dengan anggapan informan, maka dapat disimpulkan bahwa BPNT ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu yang mana dalam setiap bulannya mendapatkan bantuan beras, telur dan buah sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga setiap KPM.

“tempat berbelanja pangan adalah dilakukan di e-warong dengan menggunakan transaksi perbankan menggunakan kartu kombo sebagai alat pembayaran untuk belanja pangan yang berisi uang elektronik sejumlah Rp 200.000/KPM. Akan tetapi sejak berlakunya Program BPNT pada Juli 2019 hingga sekarang, masih banyak masyarakat yang sudah masuk dalam golongan ekonomi mampu tapi masih mengharapkan bantuan, sedangkan masih ada yang lebih layak dari penerima BPNT ini, hal ini dikarenakan data Kementerian Sosial yang hanya diperbaharui enam bulan sekali sehingga dalam kurun waktu 6 bulan perekonomian masyarakat banyak yang berubah “ (Hasil wawancara dengan SS/18/06/2021).

Sesuai dengan anggapan informan di lapangan maka dapat disimpulkan transaksi BPNT hanya dapat dilakukan di E-Warong dengan transaksi perbankan menggunakan kartu kombo dengan uang elektronik seniali Rp 200.000/KPM. Program BPNT ini berlaku sejak 2018, dan pelaksanaan program dilapangan telah berjalan hanya saja pembaharuan data pada basis data di Kementerian Sosial yang hanya diperbaharui sekali dalam 6 bulan, sehingga beberapa masyarakat yang sudah tidak menjadi indikator penerima BPNT masih menjadi penerima BPNT.

Dari seluruh hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan yang terima bukan hanya beras, sebagaimana Program Rastra yang hanya memberikan bantuan beras dan juga subsidi Rp.5000/kg nya sedangkan untuk Program BPNT tidak hanya memberikan bantuan beras saja, tetapi juga diberikan bantuan berupa telur yang menjadi bantuan pokok, beras yang diterima sejumlah 10 kg dan 1 rak telur. Selain bantuan pokok ada bantuan tambahan lain seperti buah-buahan yang memiliki kualitas tinggi dan sehat karena bahan pangan yang diberikan memiliki kualitas bagus. Beras BPNT memiliki kualitas premium sedangkan untuk program Rastra memiliki kualitas medium, sedangkan untuk telur dan buah mengandung vitamin yang tinggi karena baru panen.

Dengan demikian BPNT sangat membantu beban pengeluaran rumah tangga dalam bulanan, karena BPNT memberikan beberapa bantuan selain beras. Bantuan pangan diterima setiap bulan akan tetapi tidak ada jadwal pasti penerimaan bantuan, keterlambatan penyaluran bantuan dikarenakan pengumpulan berkas yang kadang terlambat dan ketersediaan bahan pangan yang terlambat dikirimkan karena belum waktunya panen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan pada penelitian yang akan dipaparkan mengenai Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yaitu sebagai berikut :

Dalam evaluasi Program E-Warung menggunakan Evaluasi Program dengan dua indikator sebagai berikut:

1. Proses

Proses pengambilan bantuan dilakukan di e-warong dengan berbelanja bahan pangan menggunakan uang elektronik melalui kartu kombo yang berisi uang elektronik di e-warong. Untuk mendapatkan BPNT hanya perlu mengumpulkan dengan KK dan KTP. Penerima bantuan sosial ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah di data dan memenuhi syarat di mana mereka yang tergolong dalam kondisi kesejahteraan sosial ekonomi dalam taraf 25 % terendah yang bersumber dari DT PPFM. Daftar penerima KPM ditentukan dan diseleksi oleh Kementerian Sosial setiap bulan November, setelah itu daftar KPM akan diberikan kepada bank penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial, yang kemudian akan diverifikasi maka penerima bantuan

akan dibuatkan buku rekening di bank dan akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahter (KKS) atau dalam istilah BPNT disebut kartu kombo. Kemudian KPM membawa ke E-Warong untuk bertransaksi untuk mendapatkan bantuan berupa beras, telur dan buah-buahan.

2. Hasil

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bantuan pangan yang didapatkan berupa beras 1 karung dengan jumlah 10 kg ditambah dengan telur 1 rak sebagai bantuan pokok dan ditambah dengan bantuan tambahan seperti buah-buahan dengan memiliki kualitas yang tinggi dan sehat. Bantuan ini diharapkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta memenuhi gizi yang lebih seimbang

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Sekiranya data penerima bantuan sosial agar sesering mungkin untuk diperbaharui karena kondisi sosial masyarakat bisa saja berubah dalam kurun waktu tertentu.
2. Waktu penyaluran bantuan agar bisa tepat waktu sehingga masyarakat tidak bingung lagi kapan ke E-Warong untuk mendapatkan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011).
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2007 edisi revisi II hal38-39.Aksara,1983 cet IX).
- Amir, H. (2018, November). 38.558 Warga Kabupaten Gowa Terima Bantuan Non Tunai. <https://makassar.sindonews.com>. (diakses pada tanggal 20 April 2020).
- Anisa, Naim. 2011. *Studi Komparasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi antara Metode Penerapan Number Heads Together (NHT) dengan Metode Diskusi pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar Dasar Evaluasi Program Pendidikan* (Edisi Ketiga). Bumi Aksara
- Cox, David. 2004. "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in thAsia Pacific Region" *Makalah* disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia.Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret 2004.Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung:Humaniora,2004).
- Haryati Roebhyantho dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, (Jakrta: P3KS Press, 2011)Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).Istiana Hermawati dkk, *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2001).
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).Lin N, *Social Capital: A Theory of Social Structure Action*.
- Rahardjo P. 2012. *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Jakarta : Penerbar Swadaya.
- Sahasad, Herdi. (2012). Diaspora Alumni IPTN di Amerika: Nasionalisme Melawan Kekalahan? *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban ULUMUL QUR'AN*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat Kerjasama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 01/XXI/2012.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.*
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995)
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Tayibnapi, (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahyu, Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1982). Weiss CH, *Evaluation Research Method For Assesing Programme Effectiveness*, (Engle Word Cliffs: Prentice. Hall. Inc, 1972.
- Yustika. *Perkembangan Bisnis Form di Dunia*, (Jakarta : PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, 2009)
- Lain-lain :
- Buku Panduan Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Terintegritas (Cetakan Kedua November 2018). TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

LAMPIRAN

Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Alimuddin R, S.Sos

(Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial)



Sumber : Dokumentasi 2021

Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Suherman Syam

(Pendamping PKH Kecamatan Parigi)



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Syaifatul Husna
(Pengelola E-Warong)



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Tanang
(Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar 5 : Contoh Kartu Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)




- SK PENGUJI

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 004/FSP/A.4-11/1/13/2022
 Tanggal : 20 Januari 2022.


Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Jumat, 21 Januari 2022, Jam : 08.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1.	10564 11088 18	Vinka Audrina Sahrir	IP	Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas	1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si 2. Ahmad Harakan, S.Hi., M.H.I	1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si(Ketra) 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
2.	10564 11092 17	Reski Awalyah	IP	Partisipasi Politik Perempuan dalam Meningkatkan Demokrasi pada Pemilihan Walikota Makassar	1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si 2. Muh Randhy Akbar, S.Ip., M.Si	3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I 4. Hardianto Hawing, ST.,MA
3.	10564 11166 16	Syamsul Bahri	IP	Implementasi Politik Pemilu Pemenang Pilkada di kabupaten Takalar 2022	1. Ahmad Harakan, S. Ip., M.H.I 2. Hardianto Hawing, ST.,MA	
4.	10564 02030 14	Awal Maulana	IP	Evaluasi program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warung) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.IP., M.Si	

Makassar, 20 Januari 2022
 Dekan,

 Dr. Hj. Ilyani Malik S.Sos, M.Si
 NPM : 130727

- Izin Penelitian

ASTRIAN/01/PRAPENELITIAN/0001/PT/0001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 15 April 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/053/DPM-PTSP/PRAPENELITIAN/IV/2021	1. Kepala Dinas Sosial Kab. Gowa
Lamp : -	2. Camat Parigi
Perihal : <u>Rekomendasi Pra Penelitian</u>	di-
	<u>Tempat</u>

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Muhammadiyah Makassar Nomor : 199/05/C.4-VIII/III/40/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Izin Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: AWAL MAULANA
Tempat/Tanggal Lahir	: Bangkeng Kajang / 26 Juli 1995
Nomor Pokok	: 10564020314
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa
Alamat	: Btn Griya Nurul Baidah Blok B2 NO. 4


Bermaksud akan mengadakan Pra Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu.

Selama : 21 April 2021 s/d 5 Mei 2021
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Awal Maulana
NIM : 105640203014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 Januari 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursman, S.Hum., M.I.P.
NBM. 064.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Dokumentasi proses penelitian di lapangan.





PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
 disalurkan dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021) melalui HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN)

Manfaatkan dengan bijak dan tepat:

- Peningkatan Kesehatan Keluarga:**
 - transportasi ke layanan kesehatan
 - makanan bergizi
 - kebutuhan perlengkapan kesehatan
- Peningkatan Pendidikan anak:**
 - transportasi ke sekolah
 - pendidikan & biaya ekstrakurikuler
 - kebutuhan peralatan sekolah
- Mengurangi Beban Keluarga & Meningkatkan Pendapatan:**
 - kebutuhan keluarga
 - ditabung
 - modal usaha

PROGRAM SEMBAKO/BPNT
 Nilai Bantuan Rp200.000,-/bulan/KK
 disalurkan melalui Perbankan dan agen yang ditunjuk dari Januari - Desember 2021 untuk dibelanjakan di tempat yang ditentukan

BAHAN PANGAN:

- Karbohidrat:** beras, jagung pipilan, sago
- Protein Hewan:** telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar
- Protein Nabati:** kacang-kacangan, tahu, tempe
- Sumber Vitamin & Mineral:** Sayur mayur, buah-buahan

BANSOS TUNAI (BST)
 Nilai Bantuan Rp300.000,-/bulan/KK
 disalurkan melalui PT POS selama 4 bulan (Januari - April 2021)

Manfaatkan dengan bijak dan tepat:

- Kebutuhan pokok/bahan makanan beras/jagung, tahu, sate, sayur mayur, buah-buahan.
- Keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi Covid-19

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA | LAYANAN PENGADUAN BANSOS COVID-19 | bansosCovid19@kemsos.go.id | 0811 10 222 10

DILARANG UNTUK DIBELIKAN ROKOK DAN MINUMAN KERAS!



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AWAL MAULANA, dilahirkan di Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Balleanging Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi pada hari Rabu 26 Juli 1995. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari keluarga bapak H. Akbar, S,Pd., MM dan Hj. Satriah, S,Pd.I. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Raulo Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi pada tahun 2008. Pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Parigi Desa Majannang Kecamatan Parigi dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Parigi yang saat ini telah berganti nama menjadi SMA Negeri 12 Gowa dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada Tahun 2022 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam karya ilmiah dengan judul “ Evaluasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa’.